

ABSTRAK

Keadilan spasial merupakan salah satu pendekatan dalam keadilan sosial pada aspek ruang/geografis. Keadilan spasial erat kaitannya dengan distribusi fasilitas publik, seperti fasilitas pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Sebagai hak dasar, pendidikan harus bisa diakses oleh setiap individu tanpa adanya kesenjangan dan perbedaan. Selain itu, pendidikan juga dapat mendukung pembangunan wilayah, melalui penciptaan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah. Namun, saat ini tingkat APM Kabupaten Pati pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas belum mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan permasalahan perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan antarkecamatan, yang dapat berdampak terhadap ketidakadilan spasial. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan formal di Kabupaten Pati sebagai instrumen keadilan spasial.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis tingkat kecukupan, ketimpangan penyediaan fasilitas pendidikan formal serta kesesuaian jurusan SMK terhadap potensi ekonomi lokal. Pada analisis tingkat kecukupan dilakukan perbandingan ketersediaan kursi dengan kebutuhan kursi setiap jenjang, untuk mengetahui kecukupan fasilitas pendidikan formal antarkecamatan dalam memenuhi kebutuhannya. Pada analisis ketimpangan fasilitas pendidikan formal menggunakan Indeks Williamson, untuk mengetahui tingkat ketimpangan yang terjadi pada jenjang pendidikan dan antarkawasan. Selanjutnya pada analisis kesesuaian jurusan SMK terhadap potensi ekonomi lokal menggunakan matriks checklist kriteria, untuk mengetahui keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pati.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya ketidakmerataan fasilitas pendidikan formal di Kabupaten Pati, yang dapat dilihat dari tingkat kecukupan. Kecamatan Pati dan Kecamatan Juwana yang dilewati oleh jalan arteri primer dan sekaligus berperan sebagai PKL di Kabupaten Pati memiliki kecukupan lebih tinggi, sehingga memiliki kesempatan yang lebih mudah dalam memperoleh pendidikan dibandingkan di kecamatan lainnya yang berada di sebelah utara dan selatan di Kabupaten Pati. Terjadi ketimpangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan formal di Kabupaten Pati antarkecamatan, dengan jenjang yang paling mengalami ketimpangan adalah SMA/SMK. Hal ini menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan formal antarkecamatan di Kabupaten Pati masih belum sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatannya. Selain itu, jurusan SMK di Kabupaten Pati belum mendukung sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan hasil analisis, dirumuskan rekomendasi berupa pemerataan fasilitas pendidikan formal di Kabupaten Pati terutama di wilayah bagian utara dan selatan, melalui peningkatan tipe sekolah, pembangunan fasilitas pendidikan baru pada jenjang SMA/SMK dan penambahan jurusan yang termasuk ke dalam rumpun bidang keahlian agroekoteknologi dan agribisnis, serta kemaritiman.

Kata Kunci : Keadilan Spasial; Fasilitas Pendidikan; Kecukupan; Kesesuaian